

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara selalu punya cara masing-masing dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Di Indonesia, sumber pendapatan terbesar berasal dari pajak. Pajak ialah bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, dimana memiliki sifat memaksa dengan landasan Undang–Undang, dan juga tidak mendapat timbal balik secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dalam rangka memakmurkan rakyat (UU nomor 28 tahun 2007).

Pajak yang masuk ke negara akan digunakan untuk program pemerintah. Diantaranya pembangunan, menanggulangi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, serta program pemerintah lainnya yang diupayakan dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi indikator yang sangat berpengaruh dalam kemandirian finansial suatu negara. Sebab jika sudah mencerminkan tanda finansial yang mandiri, itu berarti negara tidak membutuhkan sumber hutang dari negara lain.

Oleh karena itu, negara akan berupaya agar pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat sesuai target. Diantaranya dengan terus memperbaiki peraturan dan mempermudah akses dalam urusan perpajakan, serta memaksimalkan perkembangan online dalam dunia perpajakan. Aplikasi perpajakan online telah disusun sedemikian rupa agar wajib pajak bisa mendapatkan info perpajakan dengan lebih mudah dan mematuhi peraturan

perpajakan yang berlaku. Diharapkan pula timbul kesadaran perpajakan oleh wajib pajak. Baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan usaha.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 5 tahun berturut-turut. Rata-rata selama tahun 2014-2018 dari pajak sebesar 79,51%, sisanya 19,85% berasal dari pendapatan negara bukan pajak serta 0,5% berasal dari hibah.

Tabel 1. 1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2014-2018
(miliar rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2014	1.280.389	1.146.866
2015	1.379.992	1.240.419
2016	1.546.665	1.284.970
2017	1.498.871	1.343.530
2018	1.618.095	1.518.790
Jumlah	7.324.012	6.534.574

Sumber : Kementerian Keuangan

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi pajak selalu lebih rendah dari jumlah yang ditargetkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam urusan perpajakan. Karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Dalam sisi pemerintah mengharapkan agar penerimaan pajak dapat optimal, sebab pendapatan negara nantinya juga akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dari sisi wajib

pajak selalu ingin menekan biaya pajak yang ada melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dewi dan Jati (2014) menyatakan *Tax Avoidance* sebagai upaya pengurangan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan atau loopholes. *Tax avoidance* diperbolehkan karena masih berada dalam ranah hukum yang berlaku, serta tidak menunjukkan aktivitas penggelapan pajak dimana akan merugikan negara. *Tax avoidance* akan berdampak pada penerimaan pajak oleh negara yang tidak optimal dan belum bisa sesuai target. Biasanya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan membuat manajer bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek, dimana hal tersebut bisa jadi menguntungkan atau merugikan pemegang saham untuk periode panjang.

Salah satu faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* dalam suatu perusahaan ialah *Corporate Governance (CG)*. *Corporate Governance* erat kaitannya dengan praktik *tax avoidance* yang dilakukan suatu perusahaan. Karena *Corporate Governance* menunjukkan sistem yang mengatur hubungan antara berbagai partisipan yang berkepentingan dalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa merugikan pemangku kepentingan yang ada. Terciptanya *corporate governance* perusahaan yang baik akan meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Demikian pula sebaliknya apabila *corporate governance* masih belum dilaksanakan dengan optimal, kondisi tersebut akan mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dalam mengetahui peran *corporate governance* terhadap *tax avoidance* diantaranya : Marfirah dan SyamBZ (2016) mendapatkan hasil penelitian *Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga didapat dari penelitian Rahmawati et al.(2016) bahwa *Corporate Governance* menggunakan proksi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, Saputra et al.(2015) menyebutkan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Manajemen Laba merupakan faktor lain yang mempengaruhi adanya *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Wajib pajak badan usaha akan menggunakan strategi manajemen laba agar bisa mengurangi pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Manajemen laba yang dilakukan dengan harapan akan mengoptimalkan laba yang diperoleh perusahaan tanpa harus terpotong banyak dengan adanya pajak. Manajer akan berupaya dalam mengelola pengaturan laba sedemikian rupa agar bisa mendapatkan langkah terbaik untuk melancarkan aksinya dalam memanipulasi laba perusahaan. Praktek manajemen laba dilakukan perusahaan sebagai alat untuk melakukan penghindaran regulasi pemerintah (*political cost hypothesis*).

Penelitian terkait dengan manajemen laba terhadap *tax avoidance* yang terdahulu diantaranya : Silvia (2017) mendapatkan hasil manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Wardani et al.(2019) manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, Henny (2019) mengemukakan hasil penelitian jika manajemen laba tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Rahmadani et al.(2020) menyatakan manajemen laba berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Corporate Social Responsibility (CSR) juga merupakan variabel yang berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Sebab jika kita lihat pada umumnya, perusahaan yang mempunyai pengungkapan *corporate social responsibility* dengan baik cenderung tetap melakukan praktik *tax avoidance*, diperkirakan karena biaya yang cukup besar dalam program *corporate social responsibility*. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Maraya dan Yendrawati (2016). Menurut World Bank Group (dalam Hidayati dan Fidiana, 2017) tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat.

Dengan adanya *corporate social responsibility*, seharusnya perusahaan bisa menghindari praktek *tax avoidance*. Karena prinsip yang ada dalam *corporate social responsibility* salah satunya agar mendapat legitimasi dari masyarakat sekitar yang ikut merasakan manfaat dari perusahaan tersebut melalui program-program *corporate social responsibility* yang dijalankannya. *Corporate social responsibility* menjadi hal yang sering untuk diteliti karena pengaruhnya

cukup besar dalam adanya praktik *tax avoidance* suatu perusahaan. Penelitian sebelumnya seperti Maraya dan Yendrawati (2016), Rahmawati et al.(2016) dan Septiadi et al.(2017) mendapat hasil penelitian pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Darsono(2015), Sandra dan Anwar (2018), dan Tiarawati(2016) mengungkapkan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Corporate social responsibility menjadi faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada beberapa perusahaan, namun CSR juga dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya : *corporate governance* dan manajemen laba. Habbash (2016) menyatakan bahwa *corporate governance* berevolusi sebagai sarana yang mengakomodasi hubungan bisnis lingkungan dan hubungan bisnis masyarakat. Dian (2013) *good corporate governance* memiliki keterikatan yang erat dengan *corporate social responsibility* karena dalam prinsip GCG *point responsibility* (pertanggungjawaban) dapat diwujudkan dengan pelaksanaan *corporate social responsibility* sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Penerapan *corporate governance* yang baik dapat mendorong manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan tepat, termasuk merealisasikan tanggung jawab sosialnya.

Hal ini telah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti, diantaranya: Bramatalla (2016) *Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Siregar dan Priantinah (2017) mengungkapkan *Corporate*

Governance menggunakan proksi ukuran komite audit dan komposisi kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Yusran et al.(2018) ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Sedangkan, Pradana (2017) memperoleh hasil bahwa proksi dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Jayanti dan Husaini (2018) independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, serta kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan pada pengungkapan *corporate social responsibility*.

Menurut Oktafia(2013) Manajemen laba tidak hanya mempengaruhi pemilik perusahaan tetapi juga berpengaruh pada *stakeholders* lainnya. Manajemen laba dapat menyesatkan *stakeholders*. Dalam hal ini mengenai nilai aset, transaksi, atau posisi keuangan perusahaan, dan hal ini mempunyai konsekuensi negatif bagi pemegang saham, lingkungan di mana perusahaan berada, kreditor, karyawan, reputasi dan keamanan karir manajer serta masyarakat secara keseluruhan.

Adanya kewaspadaan yang dilakukan oleh *stakeholders* terhadap praktik manajemen laba, dapat mengancam keamanan posisi manajer dan merusak reputasi perusahaan. Menyebabkan manajer mempunyai insentif untuk mengkompensasi *stakeholders* melalui praktik pengungkapan tanggung jawab

sosial. Sari dan Sidharta (2014) menemukan bahwa manajer yang melakukan manipulasi laba akrual akan menggunakan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* sebagai perilaku etis untuk memberikan sinyal yang akan mengalihkan perhatian pemegang saham dari isu yang bisa membuat manajer dihukum.

Penelitian tentang pengaruh manajemen laba terhadap *corporate social responsibility* telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu Sunarsih (2017) menunjukkan bahwa manajemen laba terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan, Zahari dan Herawati (2015) manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Oktafia(2013), Mustika et al.(2015)menunjukkan bahwa manajemen laba signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pentingnya peran pajak untuk Indonesia menjadi bukti bahwa pengoptimalan pendapatan negara khususnya yang berasal dari pajak harus terus diupayakan dengan cara terbaik. Praktik *tax avoidance* menjadi salah satu penghambat pencapaian target penerimaan negara dari pajak. Oleh karenanya penting untuk meneliti lebih dalam mengenai *tax avoidance* di Indonesia. Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap kegiatan *tax avoidance*. Dimana telah banyak penelitian yang terkait dengan *tax avoidance*.

Hal itulah yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ulang terkait dengan adanya *tax avoidance*, terlebih lagi hasil penelitian

sebelumnya belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian ini merupakan gabungan penelitian Maraya dan Yendrawati(2016) tentang Pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance* dan Septiadi et al.(2017) tentang Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan mendasar yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian kali ini mengajukan variabel CSR menjadi mediasi (variabel intervening), menggunakan indeks untuk variabel *corporate governance*. Selain itu memakai sampel perusahaan terdaftar sebagai peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilaksanakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA. Menggunakan data terbaru yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Dalam penelitian ini mengajukan *corporate social responsibility* sebagai mediasi karena diharapkan *corporate social responsibility* membawa pengaruh yang cukup besar terhadap praktik *tax avoidance*. Dimana jika *Corporate Governance* sudah dilaksanakan dengan optimal akan membuat perusahaan lebih peduli dengan program *corporate social responsibility*, yang akan mempengaruhi ketertiban dalam urusan perpajakan. Begitu pula apabila perusahaan yang melakukan aktivitas manajemen laba, bisaanya akan memanipulasi beban dengan menggunakan biaya yang dikeluarkan dalam *corporate social responsibility*.

Dengan demikian praktik *Tax Avoidance* sulit dihindarkan karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah.

1.2 Perumusan Masalah

Pajak merupakan element penting untuk Indonesia, dikarenakan mempunyai peran yang sangat besar dalam kontribusi APBN setiap tahunnya. Sumber penerimaan negara terbesar hanya berasal dari penerimaan perpajakan. Namun berdasarkan data dari kementerian keuangan memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan selalu berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dipicu karena adanya praktik *tax avoidance* oleh perusahaan yang ingin beban pajak tertanggungnya seminimal mungkin. Dalam praktiknya banyak penyebab yang mempengaruhi perusahaan agar melakukan *tax avoidance*. Beberapa indikator yang mendukung terjadinya praktik *tax avoidance* dalam suatu perusahaan antara lain : *Corporate Governance*, Manajemen Laba, dan *corporate social responsibility disclosure*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapat rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*?
2. Bagaimana pengaruh Manajemen Laba terhadap *Corporate Social Responsibility*?
3. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*?
5. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*?

6. Bagaimana peran *Corporate Social Responsibility* dalam memediasi hubungan antara *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*?
7. Bagaimana peran *Corporate Social Responsibility* dalam memediasi hubungan antara Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar menciptakan kemandirian finansial pada suatu negara, diperlukan upaya untuk membuat sumber penerimaan negara bisa memenuhi kebutuhan dalam negara tersebut. Kendala yang timbul ialah penerimaan pajak yang merupakan penerimaan tertinggi negara menjadi kurang maksimal karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Dimana dari sisi wajib pajak badan menginginkan pajak terutanganya berada dalam jumlah yang rendah sehingga perusahaan akan mendapatkan laba lebih banyak. Beberapa faktor yang menyebabkan kemungkinan praktik *tax avoidance* menjadi meningkat adalah *Corporate Governance*, Manajemen Laba, Serta *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Jadi, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya praktik *tax avoidance* yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari *Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*.
2. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari Manajemen Laba terhadap *Corporate Social Responsibility*.

3. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh yang timbul dari *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari *Corporate Social Responsibility* dalam memediasi hubungan *Corporate Governance* dan *Tax Avoidance*.
7. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari *Corporate Social Responsibility* dalam memediasi hubungan Manajemen Laba dan *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *Tax Avoidance*, serta pengaruh manajemen laba dan *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* melalui *corporate social responsibility disclosure* dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori tentang perpajakan, *corporate governance* manajemen laba, serta *corporate social responsibility* dalam implikasi di perusahaan.
2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh

perusahaan mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan negara, perusahaan seharusnya lebih mempertimbangkan tentang peran pajak yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat agar lebih bijak dalam menentukan upaya *tax avoidance* dan tetap memerhatikan peraturan yang berlaku supaya tidak melakukan penggelapan dalam urusan perpajakan.

3. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai *tax avoidance*, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor didalam menilai kecenderungan *Tax Efficiency* yang dilakukan masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi secara tepat.
4. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan lebih mendalam terkait pentingnya penerapan *corporate governance* agar semua pihak yang berkepentingan tidak merasa dirugikan serta mengurangi adanya asimetri informasi dalam perusahaan.
5. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk pemerintah dan juga pihak investor terkait dengan kegiatan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Karena dengan manajemen laba membuat posisi keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Hasil dalam penelitian ini menjadi penjabar terhadap pentingnya perusahaan untuk melakukan *corporate social responsibility* dalam rangka mendapatkan legitimasi dari masyarakat di sekitar perusahaan didirikan agar perusahaan bisa terus bertahan di lingkungan tersebut.